

Analisis Sosial Masyarakat Sumenep dalam Meningkatkan Kualitas Garam Rakyat

Mukhlishi, Ubaidillah Cholil, Moh. Fadli, Nurul Huda, Zainol Huda,
Dedi Eko Riyadi Hs, Tamimah, Mohammad Sholeh
(Tim Peneliti STAI Miftahul Ulum Tarate Pandian Sumenep)

ABSTRAK

Madura merupakan salah satu pulau di provinsi Jawa Timur yang terdiri dari empat kabupaten yaitu Bangkalan, Sampang, Pamekasan, dan Sumenep. Sumenep berada diujung Timur Pulau Madura merupakan wilayah selain terdiri wilayah daratan juga terdiri dari kepulauan yang tersebar ke 126 pulau. Sumenep merupakan salah satu wilayah penghasil garam di Madura, Per 30 Agustus 2021 Produksi garam di Sumenep mencapai 40,775.39 Ton.

Dinas Perikanan Sumenep mencatat produksi garam pada tahun 2015 sebanyak 236.117,96 ton, tahun 2016 sebanyak 17.109, 20 ton, tahun 2017 sebanyak 232.393,29, dan tahun 2020 sebanyak 236.368 ton. Namun demikian sektor produksi garam masih termarginalkan karena daya saing SDM rendah, kapasitas produksi kecil dan dengan mutu garam yang tidak seragam, lemahnya kultur kewirausahaan petambak garam. Sampai saat ini produksi garam dalam negeri hanya laku untuk garam konsumsi sedangkan garam industri masih impor. Oleh karena itu, penelitian ini memfokuskan kajian tentang analisis sosial masyarakat sumenep dalam meningkatkan kualitas garam rakyat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif, dengan mengambil lokasi di dua desa; Desa Pinggirpapas dan Desa Gresik Putih. Analisis dilakukan melalui tiga teknik: observasi, interview, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa permasalahan yang dihadapi petani garam di dua desa tersebut disebabkan oleh faktor berikut; (1) siklus cuaca yang tidak menentu; (2) minimnya modal; dan (3) rendahnya harga jual garam nasional.

Kata Kunci: Analisis Sosial, Petani Garam, Masyarakat, Garam Rakyat

Pendahuluan

Indonesia merupakan negara maritim, kaya akan sumber daya kelautan juga kekayaan keanekaragaman hayati dan non hayati kelautan yang tersebar pada 3,351 juta km² wilayah laut dan 2,936 km² wilayah perairan zona ekonomi eksklusif dan landasan kontinen (BPS, 2018:83). Pandemi COVID-19 masih berdampak nyata pada seluruh aspek

kehidupan perekonomian nasional bahkan dunia. Penurunan terjadi pada sejumlah sektor ekonomi. Ketika sektor yang lain mengalami penurunan atau perlambatan, sektor Pertanian justru mengalami peningkatan pada kuartal 2 dan 3 tahun 2020. Pada triwulan II PDB sektor pertanian tumbuh 16,24% dan pada triwulan III tumbuh 2,15%. Pertumbuhan sektor pertanian sekaligus membuat kontri-

businya terhadap ekonomi nasional terus menguat. Hal ini terlihat dari peningkatan kontribusi pada PDB triwulan III yang makin meningkat menjadi sebesar 571,87 triliun rupiah atau 14,68% (Kementerian Pertanian, 2020).

Berdasarkan data Kementerian Kelautan dan Perikanan 2020, produksi garam nasional pada tahun 2016 sebanyak 168 ribu ton, tahun 2017 sebanyak 1,1 juta ton, tahun 2018 2,7 juta ton, 2019, 2,3 juta ton, dan tahun 2020 sebanyak 3 juta ton (Kementerian Kelautan dan Perikanan, 2017). Hal ini menunjukkan bahwa produksi garam dalam negeri dapat memenuhi kebutuhan garam bagi sektor industri. Namun di perkirakan Indonesia masih belum terbebas dari impor garam dalam waktu dekat, karena kebutuhan garam bagi sektor industri saat ini terus meningkat dengan produktivitasnya yang tinggi. Disisi lain, kualitas garam produksi lokal masih dianggap belum memenuhi kebutuhan kualitas tertentu yang harus dipenuhi. Misalnya, kadar NaCl harus minimal 97 persen (Kementerian Perindustrian, 2021). Produksi garam di Indonesia pada umumnya dilakukan secara individual oleh petani garam secara tradisional dan sangat bergantung pada kondisi iklim-cuaca (Azizi et.al., 2011; Kumala, 2012).

Madura terletak di sebelah utara dan timur Laut Jawa, sedangkan di sebelah selatan dan barat adalah Selat Madura. Madura merupakan salah satu pulau di provinsi Jawa Timur yang terdiri dari empat kabupaten yaitu Bangkalan, Sampang, Pamekasan, dan Sumenep (Nur & Nuraini, 2011). Sumenep berada diujung Timur Pulau Madura merupakan wilayah selain terdiri wilayah daratan juga terdiri dari kepulauan yang tersebar ke 126 pulau. Sumenep merupakan salah satu wilayah penghasil garam di Madura, Per 30 Agustus 2021 Produksi garam di Sumenep mencapai 40,775.39 Ton.

Dinas Perikanan Sumenep men-

catat produksi garam pada tahun 2015 sebanyak 236.117,96 ton, tahun 2016 sebanyak 17.109, 20 ton, tahun 2017 sebanyak 232.393,29, dan tahun 2020 sebanyak 236.368 ton. Namun demikian sektor produksi garam masih termarjinalkan karena daya saing SDM rendah, kapasitas produksi kecil dan dengan mutu garam yang tidak seragam, lemahnya kultur kewirausahaan petambak garam. Sampai saat ini produksi garam dalam negeri hanya laku untuk garam konsumsi sedangkan garam industri masih impor.

Perilaku Masyarakat Pesisir Petambak Garam

Program Pembangunan Nasional yang dijalankan oleh pemerintah di masa lalu belum memberikan dampak ekonomi yang signifikan kepada masyarakat pesisir, hal ini disebabkan karena kebijaksanaan pemerintah dimasa tersebut masih berorientasi pada eksploitasi. Suksesnya di darat sebagai sasaran utama pembangunan nasional sehingga masyarakat pesisir menjadi terlupakan bahkan diabaikan. Secara sosial ekonomi masyarakat pesisir sangat tertinggal, bila dibandingkan dengan masyarakat lainnya. Dengan demikian, dapat dipahami bila kantong-kantong kemiskinan adalah daerah pesisir. Masyarakat petambak garam Kabupaten Sumenep merupakan salah satu dari masyarakat pesisir yang selama ini belum mampu merealisasikan program-program pemerintah yang berkaitan dengan peningkatan kualitas garam rakyat.

Temuan dilapangan dengan berbagai tantangan di bidang *marketing* atau pemasaran dan permodalan ini cukup ironis jika dibandingkan dengan keinginan dan harapan yang disampaikan oleh petambak garam dalam aspek kemitraan. Ditengah lesunya sektor perekonomian dua tahun terakhir akibat dampak Covid-19 dan ditambah lagi dengan rendahnya peranan lembaga koperasi dalam usaha garam rakyat, justru keinginan



terbesar petambak garam di Kabupaten Sumenep mengharapkan pola kemitraan yang dijalin dengan koperasi berjalan dengan baik.

1. Perilaku Sosial Masyarakat Pesisir

Zamroni (1992) menyatakan bahwa perilaku sosial merupakan hubungan antara tingkah laku masyarakat dengan tingkah laku lingkungan. Indikator-indikator perubahan perilaku sosial berbeda-beda pandangan setiap ahli. Jayasuriya dan Wodon (2002) melakukan riset di sejumlah negara menggunakan 2 kategori utama yaitu pendidikan dan kesehatan. Sedangkan Africa (2003) menggunakan indikator kebutuhan dasar minimum sistim informasi data masyarakat (MBN-CBIS) dengan 3 indikator utama yaitu *survival*, *security* dan *enabling*. Usman (2003) memberikan 3 komponen utama dalam mengupas permasalahan di masyarakat yang terkait dengan kondisi lingkungan yaitu: demografi, ekonomi dan budaya. Orang pesisir memiliki rasa harga diri yang amat tinggi dan sangat peka. Perasaan itu bersumber pada kesadaran mereka bahwa pola hidup pesisir memang pantas mendapat penghargaan yang tinggi.

Ciri-ciri perilaku social di atas memiliki relevansi dengan ciri-ciri kepemimpinan sosial masyarakat pesisir. Berdasarkan kajian filologis atau naskah-naskah klasik (*kuno*) yang banyak dipengaruhi oleh ajaran agama Islam, seperti *Kitab Sindujoyo Pesisiran* dan *Babad Gresik Pesisiran*, syarat-syarat pemimpin di kalangan masyarakat pesisir adalah sebagai berikut (Widayati, 2001:3):

1. Siap menolong siapa saja yang meminta bantuan;
2. Mementingkan orang lain daripada dirinya sendiri;
3. Dermawan kepada semua orang;
4. Selalu menuntut ilmu dunia dan akhirat untuk keseimbangan kehidupan;
5. Tidak berambisi terhadap jabatan atau kedudukan walaupun banyak berjasa;

6. Rendah hati (*tidak sombong*), tetapi tidak rendah diri (*minder*);
7. Sangat benci penindasan dan berbuat adil kepada siapa saja;
8. Rajin bekerja dan beribadah, khususnya shalat lima waktu;
9. Sabar dan bijaksana;
10. Berusaha membahagi akan orang lain.

Sebagian nilai-nilai perilaku sosial di atas merupakan modal sosial yang sangat berharga jika didayagunakan untuk membangun masyarakat nelayan atau masyarakat pesisir. Demikian juga, syarat-syarat pemimpin dan kepemimpinan masyarakat pesisir memiliki relevansi yang baik untuk merekonstruksi kepemimpinan bangsa dan Negara Indonesia. Penjelajahan terhadap nilai-nilai budaya kepebisiran ini tentu saja memiliki kontribusi yang sangat strategis untuk membangun masa depan bangsa yang berbasis pada potensi sumber daya kemaritiman nasional.

2. Pemberdayaan

Perumusan Dasar program penangan pengentasan masyarakat miskin ini diarahkan dan dilaksanakan melalui 4 (empat) pendekatan yaitu:

1. Pendekatan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) masyarakat miskin baik fisik maupun non fisik, kualitas sistim social masyarakat (dititikberatkan pada aspek kelembagaan dalam masyarakat);
2. Pendekatan peningkatan dan perluasan kegiatan usaha bagi masyarakat miskin baik melalui kebijakan pembinaan dan pendampingan serta penciptaan lapangan kerja baru untuk memberikan nilai tambah secara ekonomi (minimal peningkatan pendapatan);
3. Pendekatan peningkatan lingkungan yang kondusif bagi masyarakat miskin melalui berbagai fasilitasi yang disediakan oleh pemerintah, swasta, dan masyarakat supaya aksesibilitas masyarakat miskin memiliki peluang yang sama (tingkat pososi tawar-menawar);

4. Pendekatan peningkatan jaminan sosial melalui berbagai program *social needs* yang bisa secara langsung diakses oleh masyarakat miskin.

Meski peran pemerintah sangat besar dalam rangka menangani kemiskinan, namun partisipasi masyarakat tetap diperlukan untuk menjamin berhasilnya program yang dicanangkan. Studi empiris banyak menunjukkan kegagalan pembangunan atau pembangunan tidak memenuhi sasaran karena kurangnya partisipasi masyarakat.

Banyak kasus yang menunjukkan rakyat menentang upaya pembangunan. Keadaan ini terjadi karena:

1. Pembangunan hanya menguntungkan golongan kecil orang dan tidak menguntungkan rakyat banyak bahkan pada sisi ekstrim dirasakan merugikan;
2. Pembangunan meskipun dimaksudkan menguntungkan rakyat banyak tetapi rakyat kurang memahami maksud tersebut;
3. Pembangunan dimaksudkan untuk menguntungkan rakyat dan rakyat memahaminya, tetapi cara-cara pelaksanaannya tidak sesuai dengan pemahaman tersebut;
4. Pembangunan dipahami akan menguntungkan rakyat tetapi rakyat tidak diikutsertakan (Kartasasmita, 1997).

Karena itu menjadi tugas manajemen pembangunan untuk menjamin bahwa pembangunan:

1. Harus menguntungkan rakyat;
2. Harus bisa dipahami oleh rakyat;
3. Harus mengikutsertakan rakyat dalam pelaksanaannya;
4. Dilaksanakan sesuai dengan maksud dan keinginan rakyat secara jujur, terbuka, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Analisis Sosial Masyarakat Sumenep dalam Meningkatkan Kualitas Garam Rakyat

Dari hasil penelitian secara umum, Desa Pinggir papas merupakan tempat

yang strategis dalam produksi garam. Sebab, dipengaruhi oleh angin kering, dan lagi jenis tanahnya termasuk jenis tanah alluvium hidromorf bertekstur halus (lempung). Disamping itu kondisi iklim di desa pinggir papas ini adalah tropis. Luas lahan tambak di Pinggir papas terbilang luas dibanding 6 Desa lainnya. Pinggir papas memiliki luas tambak berkisar 826,77 Ha. Setelah itu Desa Karanganyar dengan luas tambak 630,23 ha, yang disusul Marenangan Laok (351,47 ha), Kalimook (104,05 ha), Kertasada (94,82 ha), Kalianget Barat (38,88 ha), dan posisi buncit diduduki Kalianget timur dengan luas lahan tambak 16,29 ha.

Sedangkan permasalahan yang dialami oleh para petani garam di Desa Pinggirpapas dan Desa Gresik Putih antara lain sebagai berikut:

1. Siklus Cuaca yang Tidak Menentu.

Perubahan musim hujan yang tidak menentu membuat petambak kesulitan memprediksi waktu yang tepat untuk melakukan kegiatan penggaraman. Akibatnya, banyak dari petani garam yang menganggur dan tidak memproduksi garam. Sedangkan garam lokal dari produksi petambak tradisional hanya diserap masyarakat untuk garam konsumsi saja. Disisi lain pengaruh buruknya cuaca berdampak terhadap ketidakstabilan pendapatan ekonomi masyarakat petani garam mengingat dalam memproduksi garam masih menggunakan proses produksi pembuatan garam secara tradisional, yang mana hanya mengandalkan panas sinar matahari, air laut, angin, lahan pegaraman dan tenaga petani.

2. Minimnya Permodalan.

Modal merupakan satu faktor produksi yang berkaitan dengan hasil produksi, hasil produksi dapat meningkat karena digunakannya alat-alat produksi yang efisien. Semakin besar modal yang digunakan akan berpengaruh terhadap jumlah produksi yang dihasilkan, oleh



karena itu, maka tingkat penggunaan proses yang diperlukan untuk produksi akan semakin meningkat pula. Lingkungan eksternal secara tidak langsung memberikan pengaruh yang sangat kuat dalam mendukung produktivitas petani garam. Adanya permodalan bagi usaha petani garam tradisional salah satunya adalah dengan bantuan pemerintah berbentuk pemberian modal. Dukungan pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah (PEMDA) memberikan arahan dan dukungan terhadap upaya pengembangan aktivitas yang berlangsung. Hal ini yang dialami oleh petani/petambak garam di dua desa tersebut. Kurangnya modal menjadi salah satu penyebab penurunan produktivitas.

3. Rendahnya Harga Jual.

Harga jual garam menentukan keuntungan yang diterima pelaku usaha. Jika harga garam murah maka kelayakan usaha garam dipertanyakan apakah menguntungkan atau tidak bagi pelaku usaha. Kehadiran garam impor dari luar negeri memaksa petani lokal harus bersaing dengan harga dan kualitas produk garam luar negeri. Hal ini menjadi sangat ironis, dimana Indonesia sebagai negara maritim yang total keseluruhan luas wilayah daratan Indonesia adalah 1.919.440 km² terdiri dari 17.508 pulau. Indonesia terbentang sepanjang 3.977 mil dengan luas lautan sekitar 3.273.810 km². Seharusnya memungkinkan bagi Indonesia sejahtera di bidang kemaritiman dan berpeluang menjadi salah satu negara penghasil garam terbaik dunia. Namun realitanya, Indonesia saat ini masih memiliki ketergantungan yang sangat tinggi akan garam impor. Hal ini mengakibatkan harga garam lokal menjadi rendah.

Kesimpulan

Dari pemaparan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa permasalahan yang dialami petani garam antara lain. Pertama, buruknya cuaca berdampak terha-

dap ketidakstabilan pendapatan ekonomi masyarakat petani garam mengingat dalam memproduksi garam, masyarakat Desa Pinggirpapas masih menggunakan proses produksi pembuatan garam secara tradisional, yang mana hanya mengandalkan panas sinar matahari, air laut, angin, lahan pegaraman dan tenaga petani. Kedua, minimnya permodalan yang dimiliki oleh petani/petambak garam. Kurangnya modal petanigaram dalam memproduksi garam menjadi salah satu penyebab penurunan produktivitas. Ketiga, rendahnya harga jual hasil produksi garam. Kehadiran garam impor memaksa petani lokal harus bersaing dengan harga dan kualitas produk garam luar negeri. Hal ini menyebabkan harga garam lokal harus mampu bersaing dengan garam import, sehingga harga garam lokal menjadi rendah.

DAFTAR PUSTAKA

- Africa, T., 2003. *Social Statistics in the Development Agenda: Two Cases for Relevance*
- Boelaars, Yan. 1994. *Kepribadian Indonesia Modern: Suatu Penelitian Antropologi Budaya*. Jakarta: Gramedia.
- Jayasuriya, R. and Q. Wodon, 2002. *Explaining Country Efficiency in Improving Health and Education Indicators: The Role of Urbanization*. The World Bank.
- Kartasamita, Ginandjar 1997. *Administrasi Pembangunan: Perkembangan pemikiran dan Praktiknya di Indonesia*. Jakarta: LP3ES
- Korten DC dan Syahrir (ed). 1988. *Pembangunan Berdimensi Kerakyatan*. Jakarta; Yayasan Obor Indonesia.
- PT. Garam Persero. 2000. *Paparan Swasembada Garam Nasional Melalui Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat (Pugar)*, Kota Pasuruan 2011
- Sihombing, U. 2000. *Pendidikan Luar Seko-*



- lah Manajemen Strategi, Konsep, Kiat dan Pelaksanaan.* Penerbit: P.D. Mahkota, Jakarta.
- Sumodiningrat, Gunawan. 1999. *Pemberdayaan Masyarakat dan JPS*, PT Gramedia, Jakarta
- Undang-undang RI No. 32 Th. 2004. 2004. *Tentang Pemerintahan Daerah.* Jakarta.
- Usman, S., 2003. *Pemberdayaan Masyarakat.* Pustaka Pelajar. Yogyakarta, 310